

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan di Indonesia sejak jaman kemerdekaan hingga sekarang selalu berlandaskan pada asas demokrasi, hal tersebut terjadi karena pada dasarnya rakyat Indonesia bukan tergolong manusia *Homo Economicus* melainkan lebih kepada *Homo Societas*, artinya orang Indonesia lebih mementingkan hubungan antar sesama manusia dari pada kepentingan ekonomi. Demokrasi merupakan suatu sistem pemerintahan yang diselenggarakan oleh rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Hal tersebut sangat sesuai dengan landasan dari koperasi.

Secara umum koperasi diartikan sebagai perkumpulan orang-orang yang bersatu secara sukarela mempersatukan diri untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi yang dikelola secara demokratis. Koperasi menduduki posisi yang sangat penting dimata masyarakat dalam memajukan perekonomian di Indonesia. Hal itu terbukti dengan adanya pasal yang mengatakan peran dari koperasi. Pada Pasal 33 UUD 1945 di jelaskan bahwa koperasi merupakan bentuk perusahaan yang sesuai dengan sistem perekonomian di Indonesia. Sedangkan pada Pasal 4 UU No. 25/1992 antara lain mengatakan bahwa fungsi dari sebuah koperasi yaitu untuk membantu mengembangkan perekonomian Indonesia yang merupakan usaha bersama dan berlandaskan asas kekeluargaan serta demokrasi ekonomi. Undang-undang terbaru koperasi yaitu UU koperasi No. 17 tahun 2012 sempat menggantikan UU koperasi No. 25 tahun 1995. Namun undang-undang terbaru mengenai koperasi telah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK) secara resmi. Undang-undang yang dibatalkan

adalah seluruh materi muatan undang-undang tersebut. MK menilai UU koperasi No. 17 tahun 2012 selain berjiwa korporasi, undang-undang perkoperasian tersebut telah menghilangkan asas kekeluargaan dan gotong-royong yang telah menjadi ciri khas dari koperasi. Menurut MK undang-undang No. 17 tahun 2012 bertentangan dengan UUD 1945, dan menjadi tidak berkekuatan hukum mengikat setelah putusan ini. Untuk menghindari kekosongan hukum saat itu maka MK memutuskan undang-undang No. 25 tahun 1992 tentang perkoperasian berlaku kembali sampai terbentuknya undang-undang yang baru. UU No. 17 tahun 2012 dibatalkan pada tahun 2014.

Koperasi sebagai lembaga keuangan sangat diperlukan oleh masyarakat. Kegiatan usaha tersebut dapat berupa pelayanan kegiatan pemasaran, permodalan, dan pemberian pinjaman atau kegiatan lain. Koperasi biasanya menyediakan pelayanan kegiatan usaha yang tidak diberikan oleh lembaga usaha lain karena lembaga usaha lain tersebut tidak dapat melaksanakannya dikarenakan hambatan peraturan. Peran koperasi ini juga terjadi jika pelanggan memang tidak memiliki aksesibilitas pada pelayanan dari bentuk lembaga lain. Hal ini dilihat pada peran beberapa koperasi simpan pinjam dalam menyediakan dana yang relatif mudah bagi anggotanya dibandingkan dengan prosedur yang harus ditempuh untuk memperoleh dana dari bank.

Koperasi merupakan penggerak ekonomi rakyat yang orientasinya untuk menumbuhkan partisipasi masyarakat. Di Indonesia terdapat banyak jenis koperasi yang didasarkan pada kesamaan kepentingan ekonomi anggotanya. Berdasarkan jenis usahanya koperasi dibedakan menjadi empat yaitu Koperasi Simpan Pinjam, Koperasi Konsumen, Koperasi produksi, dan Koperasi Serba usaha.

Berdirinya koperasi simpan pinjam dapat dilihat dari tujuannya yaitu koperasi yang menampung dana dari anggota dan menyalurkan kembali kepada anggota yang memerlukan, dengan tujuan peningkatan kesejahteraan khususnya para anggota dan masyarakat secara umumnya. Koperasi Simpan Pinjam adalah salah satu bentuk koperasi yang mengumpulkan dana dari para anggota dan kemudian diberikan/dialirkan lagi kepada anggotanya sebagai bantuan modal untuk dimanfaatkan dalam mengembangkan usahanya (Siregar, 2013). Menteri Koperasi dan UKM (2015) mengemukakan bahwa Koperasi Simpan Pinjam (KSP) merupakan lembaga koperasi yang melakukan penghimpunan dan penyaluran dana dari anggota dan untuk anggota, untuk koperasi lain, dan juga untuk calon anggota serta perlu dikelola secara profesional yang dilakukan dengan prinsip kehati – hatian. Dalam rangka untuk mengetahui apakah mengalami peningkatan ataupun penurunan kinerja Koperasi Simpan Pinjam, maka diperlukan bagi Departemen Koperasi baik ditingkat pusat maupun daerah untuk melaksanakan penilaian kesehatan koperasi.

Koperasi simpan pinjam merupakan sebuah lembaga non bank yang bertugas memberikan pinjaman kepada masyarakat dan juga sebagai tempat penyimpanan bagi anggota koperasi. Modal dari koperasi simpan pinjam berasal dari modal sendiri dan modal pinjaman. Melihat pentingnya fungsi koperasi mengharuskan penilaian koperasi harus dilakukan agar sesuai dengan peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia No. 14/Per/M.KUKM/XII/2009. Melihat pertumbuhan jumlah koperasi di Indonesia menunjukkan semakin besar minat masyarakat yang ingin tergabung menjadi anggota koperasi. Pemerintah yang mempunyai tugas untuk memberikan

pengawasan maupun sebagai *Controlling* sudah seharusnya melakukan penilaian tentang kesehatan koperasi yang ada sehingga akan meminimalisir hal-hal yang tidak diinginkan.

Penilaian efisiensi koperasi sebagai bagian dari komponen kesehatan koperasi menurut peraturan deputy bidang pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah No. 01/PER/Dep.6/II/2017 mempunyai tujuan sebagai berikut :

1. Meningkatkan sinergitas dalam bidang pengawasan koperasi, antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota.
2. Meningkatkan fungsi pengawasan yang efektif dan efisien, sesuai dengan wilayah keanggotaannya.
3. Mendorong pengelolaan koperasi dalam menerapkan prinsip – prinsip dan nilai – nilai koperasi sesuai jati diri koperasi.

Kabupaten Bangkalan juga termasuk daerah yang mempunyai banyak koperasi. Namun disisi lain banyak juga terdapat koperasi tidak aktif dan perlu sekali mendapatkan penilaian. Dengan dilakukannya penilaian dapat diketahui bagaimana tingkat efisiensi dan juga bagaimana kondisi koperasi tersebut. Sehingga dapat dilakukan langkah-langkah yang strategis terhadap koperasi yang tidak efisien agar dapat pulih dan memperbaiki kinerjanya.

Mengutip berita dari media elektronik dengan judul (*Ratusan Koperasi di Bangkalan Tidak Aktif* - Surya, 2015) menyebutkan bahwa Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Bangkalan mencatat banyak sekali koperasi yang tidak aktif dalam beberapa tahun terakhir. Hal tersebut diketahui oleh Dinas Koperasi berdasarkan hasil investigasi. Dari 666 koperasi yang ada di Kabupaten Bangkalan ada sekitar 116 koperasi tidak aktif. Kepala Dinas Koperasi dan

UMKM Kabupaten Bangkalan Abd. Rasyid mengatakan pihaknya akan mengumpulkan semua ketua koperasi dan UMKM di Bangkalan agar dapat dilakukan pembenahan. Bagi koperasi yang tidak ingin melanjutkan maka aset yang dimiliki akan di inventarisasi. Kalau tidak pernah melakukan RAT (Rapat Anggota Tahunan) dan RAK (Rapat Anggota Kerja) maka dapat dipastikan koperasi itu akan ditutup. Jumlah koperasi yang terhitung tidak aktif masih belum termasuk UMKM yang tersebar di sepanjang kawasan di Suramadu pada sisi Madura. Jika ditambahkan koperasi yang tidak aktif mencapai 121 koperasi.

Pada tahun selanjutnya mengutip dari berita dengan judul *(593 Koperasi di Bangkalan Tinggal Papan Nama- Tribun Jatim, 2017)* Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Bangkalan Ali Afandi mengungkapkan bahwa dari 793 koperasi, hanya terdapat 200 koperasi yang aktif. Beliau mengatakan bahwa pihaknya tidak bisa berbuat apa-apa terhadap ratusan koperasi yang tidak aktif karena pencabutan izin sudah menjadi kewenangan pemerintah pusat. Terdapat 593 koperasi yang hanya tinggal papan namanya saja. Kini, Dinas koperasi hanya akan fokus pada 200 koperasi yang masih aktif dengan memberikan pembinaan dan pelatihan melalui program rutin dan pendanaan.

Koperasi simpan pinjam merupakan koperasi yang paling mendasar dan juga merupakan koperasi pokok dari koperasi yang ada. Kabupaten Bangkalan mempunyai Koperasi Simpan Pinjam (KSP) yang setiap tahun mengalami peningkatan jumlah unit. Namun dibalik itu koperasi yang tidak aktif juga ikut mengalami peningkatan. Hal ini dapat dilihat dari tabel 1.2 dibawah ini.

**Tabel 1.1 Jumlah Koperasi Simpan pinjam (unit) di Bangkalan
tahun 2013 - 2017**

Tahun	Aktif	Tidak Aktif	Jumlah
2013	68	21	89
2014	73	23	96
2015	79	29	108
2016	88	28	116
2017	87	34	121

Sumber : Dinas Koperasi dan UMKM Kab. Bangkalan, 2017 (diolah)

Dari data diatas pada tahun 2013 terdapat 24% koperasi yang tidak aktif yang berada di Bangkalan, pada tahun 2014 walaupun terjadi peningkatan jumlah koperasi, namun jumlah koperasi yang tidak aktif juga naik sehingga persentase tetap sebesar 24%, sedangkan tahun 2015 terdapat 27% koperasi yang tidak aktif, dan pada tahun 2016 turun menjadi 24%. Sedangkan pada tahun 2017 terdapat 28% koperasi yang tidak aktif.

Agar jumlah koperasi simpan pinjam yang tidak aktif tidak selalu mengalami peningkatan setiap tahun maka perlu dilakukan penilaian tentang efisiensi koperasi sebagai bagian dari rangkaian penilaian kesehatan koperasi. Selain merupakan kewajiban dari perundang – undangan juga sebagai upaya untuk meningkatkan kinerja dari koperasi simpan pinjam tersebut. jika terdapat koperasi bermasalah, maka akan dilakukan pengawasan, pendampingan, pengontrolan secara bertahap agar koperasi tersebut tidak sampai mengalami kemacetan ataupun sampai bangkrut.

Menurut (Isa, 2008) Efisiensi dari sebuah koperasi menunjukkan bahwa kinerja dari koperasi tersebut sudah baik. Selanjutnya, koperasi tersebut juga

bisa dijadikan contoh untuk koperasi yang belum efisien ataupun bagi koperasi yang baru agar dapat tumbuh dengan baik. Untuk dapat menilai efisiensi

Dalam penelitian ini peneliti ingin menggunakan metode Data Envelopment Analysis (DEA) yang digunakan untuk menilai efisiensi dari koperasi simpan pinjam di Bangkalan. Data Envelopment Analysis (DEA) diperkenalkan pertamakali oleh Charnes, Copper dan Rhodes pada tahun 1978. Konsep dari DEA merupakan pendekatan nonparametrik yang pada dasarnya dari pengembangan Linier Programing (LP). Fungsi dari DEA yaitu untuk menilai efisiensi dalam penggunaan sumber daya (input) sehingga bisa mencapai hasil yang maksimal. Kegunaan dari DEA untuk memperkirakan batas output dari hasil produksi. Hal tersebut secara empiris digunakan untuk mengukur efisiensi produksi unit dalam pembuat keputusan atau Decision Making Unit (DMU). Dalam kondisi bech marking, DMU yang efisien, seperti yang didefinisikan oleh DEA, mungkin tidak harus membentuk *Pproduction Frontier*, namun mengarah pada *Best-Practice Corner*.

Untuk mencari tingkat efisiensi Koperasi di Bangkalan, salah satu cara yang dapat dilakukan yaitu dengan menggunakan perhitungan *Data Envelopmen Analysis* (DEA). Istilah DMU dalam DEA dapat digunakan untuk mengukur bermacam-macam unit seperti bank, sekolah, departemen, universitas, sekolah, koperasi, kantor pajak, kantor polisi serta apa saja yang memiliki kesamaan dalam karakteristik operasionalnya. Ada dua faktor yang dapat mempengaruhi pemilihan DMU, yaitu harus merupakan unit-unit yang homogen. Unit-unit tersebut melakukan tugas (taks) yang sama, dan memiliki obyektif yang sama. Output yang mencirikan kinerja dari DMU harus identik, kecuali hanya berbeda intensitas dan jumlah/ukurannya.

Menurut Aji (2013) Data Envelopment Analysis digunakan untuk mengukur efisiensi, antara lain dalam kesehatan, pendidikan, transportasi, maupun perbankan. Terdapat tiga manfaat yang dapat diperoleh dari pengukuran efisiensi menggunakan DEA yaitu :

1. Untuk memperoleh efisiensi relatif yang berguna untuk mempermudah dalam membandingkan antar unit ekonomi yang sama.
2. Untuk mengukur berbagai variasi efisiensi antar unit ekonomi untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang menjadi penyebabnya.
3. Digunakan untuk menentukan implikasi kebijakan sehingga bisa meningkatkan tingkat efisiensinya.

Berdasarkan gambaran umum diatas, membuat penulis tertarik untuk mengulas lebih dalam lagi tentang bagaimana tingkat efisiensi koperasi simpan pinjam di Bangkalan, maka peneliti akan melakukan penelitian dengan berjudul **“ANALISIS EFISIENSI KOPERASI SIMPAN PINJAM DI BANGKALAN DENGAN METODE *DATA ENVELOPMENT ANALYSIS* (DEA)”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat diambil rumusan masalah Bagaimana efisiensi Koperasi Simpan Pinjam di Bangkalan dengan metode Data Envelopment Analysis (DEA)?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui efisiensi penggunaan input modal sendiri, modal pinjaman, dan juga biaya pengelolaan Koperasi Simpan Pinjam di Bangkalan terhadap output Sisa Hasil Usaha (SHU) apabila dihitung dengan metode *Data Envelopment Analysis* (DEA).

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

1. Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada pihak koperasi simpan pinjam di Kabupaten Bangkalan agar dapat mengembangkan usahanya menjadi lebih baik.
2. Sebagai perbandingan dari metode yang diterapkan oleh dinas koperasi dan UMKM Kabupaten Bangkalan.

1.4.2 Manfaat Praktis

Peneliti diharapkan dapat membandingkan sekaligus untuk melengkapi hasil penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan adalah urutan dari masing-masing BAB yang didalamnya terdapat uraian secara singkat dan jelas serta digunakan untuk mempermudah pembaca dalam memahami isi dari penelitian. Maka penulis menyusun sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan

Pada bab ini memaparkan tentang latar belakang dari penelitian yang menjadi landasan pemikiran secara garis besar serta dapat menimbulkan minat bagi peneliti untuk melakukan penelitian. Terdapat juga rumusan masalah, berisi pertanyaan yang membutuhkan penyelesaian dari hasil penelitian yang dilakukan, terdapat tujuan yang ingin dicapai serta ada manfaat penelitian yang dihasilkan dan terdapat sistematika penulisan skripsi untuk memudahkan dalam memahami isi penelitian.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini berisi landasan teori dan konsep yang relevan dengan permasalahan yang digunakan dalam memecahkan masalah penelitian. Disini juga mencantumkan penelitian terdahulu yang digunakan sebagai perbandingan dan juga acuan penelitian, terdapat kerangka pemikiran serta hipotesis untuk memberikan perkiraan hasil yang akan diperoleh.

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN

Pada bab ini memaparkan tentang metode yang digunakan, identifikasi variabel seperti variabel apa yang digunakan, definisi operasional variabel menjelaskan pengertian dari masing-masing variabel, jenis dan sumber data menjelaskan darimana data itu diperoleh, prosedur pengumpulan data serta teknik analisis.

BAB IV : PEMBAHASAN

Menguraikan analisis deskriptif dan objek penelitian, analisis data dan pembahasan.

BAB V : PENUTUP

Menguraikan tentang kesimpulan dan saran yang diberikan oleh peneliti agar peneliti selanjutnya dapat melakukan penelitian lebih baik lagi.